

# ISU Sepekan

**BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL**

*Minggu ke 3 2021 (tanggal 15 s.d. 21 Januari)*

## **BANTUAN ASING ATAS MUSIBAH JATUHNYA PESAWAT DAN BENCANA ALAM DI INDONESIA**



**Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI**

Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si  
Peneliti Hubungan Internasional  
[sita.hidriyah@dpr.go.id](mailto:sita.hidriyah@dpr.go.id)

### **ISU ATAU PERMASALAHAN**

Di awal tahun 2021 pada bulan Januari ini, Indonesia telah mengalami serangkaian musibah dan bencana alam di beberapa provinsi. Sejumlah bencana alam telah terjadi mulai dari aktivitas gunung Semeru dan Merapi, tanah longsor, banjir hingga gempa bumi. Kondisi geografis Indonesia memberikan potensi akan rawan bencana seperti yang baru-baru ini terjadi. Bahkan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia. Kondisi tersebut memberikan tugas bagi pemerintah terutama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta lembaga terkait lainnya yang melakukan penanggulangan bencana sesuai UU dan Perpres. Dukungan terhadap lembaga pemerintah tersebut perlu terus dilakukan agar dapat terus berkinerja optimal dalam penanggulangan bencana dan membantu masyarakat yang terdampak.

Dalam penanggulangan musibah serta bencana, Indonesia kerap mendapatkan bantuan dari luar negeri baik dari negara-negara sahabat maupun badan PBB. Bantuan yang diterima Indonesia merupakan aksi kemanusiaan sebagai sesama negara dunia yang bersahabat namun tidak dipungkiri dapat diwaspadai juga sebagai aksi bersifat politis. Di saat pandemi yang belum berakhir ini, kewaspadaan tersebut tidak dapat dinilai sama mengingat negara-negara lain masih terus berusaha menangani implikasi pandemi di negara masing-masing. Hal ini memaksa negara yang mengalami musibah atau bencana untuk mengatasinya dengan upaya mandiri.

Oleh karenanya Indonesia tidak dapat sepenuhnya mengandalkan bantuan luar negeri dalam menangani musibah bencana alam. Walaupun seluruh negara mengalami dampak pandemi, beberapa negara tetap memberikan perhatiannya dengan membantu Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh Singapura dan Amerika Serikat (AS) dalam menawarkan kerja sama untuk menginvestigasi penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Biro Investigasi Keselamatan Transportasi Singapura dan tim Badan Keselamatan Transportasi Nasional AS kemudian datang dan membantu penyelidikan. Bantuan kemanusiaan seperti ini pernah terjadi pada bencana gempa di Palu pada tahun 2018, dimana terdapat 18 negara yang merealisasikan bantuannya ke Indonesia.

Terjadinya musibah dan bencana alam saat pandemi Covid-19 memberi tugas lebih bagi Indonesia dalam menguji kemandirian negara untuk dapat mengatasi serta menangani kejadian secara cermat, fokus dan merata sehingga kebutuhan bagi para pengungsi dapat tersalurkan. Dalam pemberian bantuan, yang terbaru dari bencana gempa adalah datangnya tawaran dari pemerintah Taiwan untuk upaya penanganan pasca-bencana. Bantuan tersebut seperti halnya dalam penyelidikan jatuhnya Sriwijaya Air tentunya perlu diapresiasi mengingat posisi diplomasi Indonesia yang berhubungan baik dengan banyak negara.

## FUNGSI DPR

### Legislasi:

DPR mengharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan yang terintegrasi sehingga dapat menghindari serta meminimalisir dampak berbagai bencana yang terjadi. Kebijakan tersebut hendaknya senantiasa mempertimbangkan semua aspek, termasuk kewaspadaan bencana, pencegahan perusakan lingkungan dan juga kesehatan.

### Pengawasan:

Pencegahan serta penanganan bencana sudah menjadi salah satu fokus pengawasan DPR. Hal ini terbukti dengan sudah dikeluarkannya UU Penanggulangan Bencana. Fenomena alam serta kondisi geografis Indonesia membutuhkan langkah-langkah cepat dari pemerintah termasuk pada penganggulangan bencana.

### Anggaran:

DPR memberi atensinya dalam fungsi anggaran untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui tugasnya dalam memberikan persetujuan, memperhatikan pertimbangan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Anggaran yang disediakan pemerintah hendaknya dipergunakan secara tepat guna sehingga masyarakat yang berdampak dapat terbantu. Anggaran yang diperlukan dalam penataan kembali wilayah yang berdampak bencana harus disesuaikan dengan perbaikan kerusakan lingkungan yang mungkin menjadi penyebab bencana tersebut. DPR perlu memastikan agar anggaran yang diberikan dapat digunakan secara efektif oleh Pemerintah, dalam jumlah yang mencukupi tanpa menggantungkan bantuan dari luar negeri.

## ATENSI DPR RI

DPR melalui Komisi VIII dapat mendorong pemerintah untuk fokus serta sigap dalam melaksanakan tanggap darurat penanggulangan bencana. Hal ini termasuk dalam penanganan korban dengan mengerahkan bantuan yang diperlukan para pengungsi yang terdampak bencana di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, dan dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan Covid-19.

DPR dapat mendorong Pemerintah untuk terus bekerjasama dengan negara-negara lain yang dinilai lebih maju dalam hal penanganan serta pencegahan bencana seperti Jepang, AS, Mexico, dan Selandia Baru. Beragam MoU dengan beberapa negara tersebut sudah ditandatangani, namun realisasi atau tindak lanjut dari penandatanganan tersebut perlu diawasi dan diatur secara cermat sehingga kewaspadaan serta kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait dapat mengatasi bencana alam yang dapat kembali terjadi. Optimalisasi tersebut membutuhkan kerja keras seluruh lembaga maupun penyelenggara pemerintah. Dengan terjadinya bencana alam di awal tahun.

DPR dapat mendorong Pemerintah serta menyerukan partisipasi masyarakat secara berkala untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Di saat pandemi sekarang ini, pemerintah tidak bisa hanya mengharapkan bantuan dari luar negeri yang kerap kali berdatangan sesudah bencana terjadi. Apabila bantuan luar negeri ditawarkan, DPR perlu mengawasi dan meminta pemerintah untuk menyeleksi serta menentukan kebutuhan apakah yang menjadi prioritas sehingga bantuan tersebut diberikan sesuai sasaran.

## SUMBER

republika.co.id, 19 Januari 2021; kemlu.go.id, 21 Juli 2020; Republika, 10 Januari 2021; bnpb.go.id, 18 Januari 2021.